

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ASET DESA
BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI
KASUS TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA
BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Fahrul kurniawan¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

INTISARI

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Aset Desa di Desa Banyuraden dan Bagaimana Efektifitas Pengawasan Aset Desa Banyuraden, yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Aset Desa di Desa Banyuraden, dan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Aset Desa Di Desa Banyuraden. Sehingga Penelitian ini menyoroti pentingnya Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan memperkuat otonomi desa dan mempercepat pembangunan, serta diharapkan memberikan dampak pada wilayah administratif di atasnya. Untuk melaksanakan undang-undang ini, diterbitkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa dari APBN, yang kemudian diubah menjadi PP No. 8 Tahun 2016. PP No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa dana desa adalah dana dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris. Penelitian Normatif bertujuan menemukan peraturan hukum, doktrin hukum, dan data kepustakaan untuk menjawab isu hukum dalam masyarakat, sedangkan Penelitian Empiris melihat bagaimana hukum berfungsi dalam lingkungan sosial. Pemerintah Desa Banyuraden telah mengoptimalkan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun ada kendala seperti minimnya SDM dan banyaknya aset desa yang harus dikelola. Pengelolaan aset desa Banyuraden dianggap efektif, dengan upaya pengawasan yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, termasuk transparansi melalui papan pengumuman dan informasi di website desa. Namun, pengawasan belum sepenuhnya efektif karena beberapa aset desa belum terawasi dengan baik. Diperlukan peningkatan SDM melalui evaluasi mendalam terkait pengelolaan aset desa untuk mendorong perkembangan aset. Audit berkala oleh pihak independen diperlukan untuk memastikan aset desa dikelola dengan baik, mengidentifikasi potensi masalah, memberikan rekomendasi perbaikan, serta menciptakan sistem pelaporan yang transparan. Selain itu, peningkatan sistem SIPEDES akan memudahkan masyarakat mengawasi perkembangan aset desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset, Pengawasan Aset, Desa

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**EFFECTIVENESS OF VILLAGE ASSET MANAGEMENT AND
SUPERVISION UNDER LAW NO. 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES
(CASE STUDY ON VILLAGE ASSET MANAGEMENT IN BANYURADEN
VILLAGE, GAMPING DISTRICT, SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA
SPECIAL REGION)**

Fahrul Kurniawan¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

ABSTRACT

This study addresses the research questions: How effective is the management of village assets in Banyuraden Village, and how effective is the supervision of Banyuraden Village assets? The study aims to understand the management of village assets in Banyuraden Village and to assess the supervision of these assets. This research highlights the importance of Law No. 6 of 2014 on Villages, which aims to strengthen village autonomy and accelerate development, expected to impact the administrative regions above it. To implement this law, Government Regulation (PP) No. 60 of 2014 on village funds from the national budget (APBN) was issued, later amended to PP No. 8 of 2016. Article 1 paragraph (2) of PP No. 8 of 2016 states that village funds are APBN funds transferred through the regional budget (APBD) of regencies/cities and used to finance village governance, development, guidance, and community empowerment. This research employs a Normative-Empirical method. Normative research aims to discover legal regulations, legal doctrines, and library data to address legal issues in society, while Empirical research examines how law functions in a social environment. The Banyuraden Village government has optimized village asset management in accordance with applicable regulations, despite challenges such as limited human resources and the large number of assets to manage. The management of Banyuraden village assets is considered effective, with supervision efforts aligned with Law No. 6 of 2014, including transparency through notice boards and information on the village website. However, supervision is not yet fully effective as some village assets are not well-monitored. There is a need to enhance human resources through in-depth evaluation related to village asset management to encourage asset development. Regular audits by independent parties are necessary to ensure proper village asset management, identify potential issues, provide improvement recommendations, and create a transparent reporting system. Additionally, improving the SIPEDES system will facilitate community oversight of village asset development.

Keywords: Asset Management, Asset Supervision, Village.

¹ Student from the Law Study Program (S-1) at Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta

² Lecturers in the Law Study Program (S-1) at Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta